

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Akuntansi

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Secara bahasa, sistem dapat diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan secara terminologi, Hall (2011) mendefinisikan sistem sebagai suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan dan memiliki tujuan yang sama. Senada dengan Hall, Mulyadi (2016) menginterpretasikan sistem sebagai sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekelompok unsur yang saling terkait dan bekerja sama untuk mewujudkan suatu tujuan yang sama.

Sistem bukanlah konsep yang asing di kehidupan sehari-hari. Bahkan sehubungan dengan tubuh manusia saja ada yang dikenal dengan sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Sistem lain yang juga akrab didengar masyarakat adalah sistem transportasi, sistem ekonomi, dan sistem pemerintahan. Selain sistem-sistem

yang telah disebutkan, sistem lainnya yang familiar di masyarakat ialah sistem informasi.

Informasi secara umum kerap kali diartikan sebagai “data yang telah diproses”. Namun demikian, Hall (2011) menganggap persepsi tersebut tidak dapat menggambarkan makna “informasi” secara utuh. Hall menekankan bahwa perbedaan antara data dan informasi terletak pada akibat yang ditimbulkan terhadap pengguna dari data dan/atau informasi tersebut. Ia berpendapat bahwa selain merupakan data yang telah diproses, informasi juga memiliki karakteristik untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan konflik, mengurangi ketidakpastian, dan membuat keputusan.

Istilah sistem informasi sendiri berarti seperangkat prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada para pengguna (Hall, 2011). Sistem informasi diharapkan dapat membantu pengguna untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dengan biaya yang minimal. Adapun karakteristik informasi yang berguna menurut Romney dan Steinbart (2016) adalah *relevant*, *reliable*, *complete*, *timely*, *understandable*, *verifiable*, dan *accessible*. Informasi ini lah yang kemudian dimanfaatkan oleh pengguna untuk mengambil suatu keputusan yang dinilai paling tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Menurut American Accounting Association (dikutip dalam Pura, 2013), akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Lebih lanjut,

Pura juga berpendapat bahwa akuntansi dapat diterjemahkan dari berbagai aspek.

Jika ditilik dari segi sistem informasi, Pura menyatakan bahwa:

Akuntansi merupakan teknik yang menggambarkan proses dari hubungan antara sumber data dan penerima informasi melalui komunikasi. Akuntansi memiliki siklus yang disebut *accounting cycle* yang memroses bukti transaksi menjadi bentuk-bentuk informasi yang kita kenal dengan laporan keuangan, yang dapat digunakan masyarakat untuk proses pengambilan keputusan.

Hall (2011) memaknai sistem informasi akuntansi sebagai sistem yang mengumpulkan, merekam, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini sejalan dengan definisi yang diuraikan sebelumnya jika ditambahkan penekanan bahwa informasi yang dimaksud umumnya informasi terkait ekonomi/keuangan dari organisasi yang bersangkutan. Lebih lanjut, Hall juga mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi mencakup orang, prosedur dan instruksi, data, *software*, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan langkah pengamanan.

2.1.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Suatu organisasi memiliki tujuan yang berbeda satu sama lain. Bahkan ketika tujuannya sama, ada kemungkinan bahwa hal yang dibutuhkan oleh tiap organisasi berbeda antara satu dengan yang lain. Logika ini juga berlaku untuk sistem informasi akuntansi—tujuannya bisa beragam tergantung dari pengguna sistem informasi itu sendiri. Namun, Hall (2011) merumuskan beberapa tujuan dasar yang dimiliki oleh setiap sistem informasi secara umum, yaitu:

- 1) Untuk mendukung fungsi pengelolaan yang dijalankan oleh manajemen.
- 2) Untuk mendukung manajemen dalam proses pengambilan keputusan.
- 3) Untuk mendukung kegiatan operasional harian perusahaan.

2.1.3 Manfaat Sistem Informasi Akuntansi

Romney dan Steinbart (2016) mengklaim bahwa sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat memberikan nilai tambahan kepada organisasi. Berikut adalah nilai tambah yang dicetuskan oleh Romney dan Steinbart:

- 1) Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya dari produk atau layanan
- 2) Meningkatkan efisiensi
- 3) Berbagi pengetahuan
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas *supply chain*
- 5) Meningkatkan struktur pengendalian internal
- 6) Meningkatkan pengambilan keputusan

2.1.4 Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, sistem merupakan seperangkat komponen dan/unsur yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, berikut adalah komponen pembentuk sistem informasi akuntansi yang dicetuskan oleh Romney dan Steinbart (2016):

- 1) *Personel* yang menggunakan sistem
- 2) *Prosedur dan instruksi* yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data
- 3) *Data* mengenai organisasi dan aktivitas bisnis yang dijalani
- 4) *Software* yang digunakan untuk mengolah data

- 5) *Infrastruktur teknologi informasi*, termasuk komputer, *peripheral devices*, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi
- 6) *Pengendalian internal dan langkah pengamanan* yang digunakan untuk memastikan keamanan dari data yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi

2.1.5 Subsistem Sistem Informasi Akuntansi

Selain enam komponen yang terlibat dalam sistem informasi akuntansi, terdapat subsistem yang membentuk dan mendukung performa sistem informasi akuntansi. Hall (2011) menyebutkan bahwa sistem informasi akuntansi terdiri dari tiga subsistem utama; sistem pemrosesan transaksi (*transaction processing system—TPS*), sistem buku besar/pelaporan keuangan (*general ledger/financial reporting system—GL/FRS*), dan sistem pelaporan manajemen (*management reporting system—MRS*). Berikut disajikan penjelasan mengenai tiap subsistem:

1) Sistem Pemrosesan Transaksi (*Transaction Processing System—TPS*)

TPS dapat disebut sebagai pusat dan inti dari sistem informasi akuntansi. Sistem ini berfungsi untuk mengkonversikan kejadian ekonomik menjadi transaksi keuangan, merekam transaksi tersebut dalam catatan akuntansi seperti jurnal dan *ledger*, serta mendistribusikan informasi keuangan yang dibutuhkan para personel untuk menjalankan operasional sehari-hari. TPS menjadi penting untuk operasional sehari-hari karena pada umumnya, suatu organisasi harus menangani banyak transaksi bahkan hanya dalam kurun waktu satu hari. Lazimnya, transaksi yang dimaksud bersifat repetitif sehingga transaksi yang memiliki karakteristik serupa

dapat dikelompokkan menjadi suatu siklus transaksi. Adapun siklus yang dimaksud adalah siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus konversi.

2) Sistem Buku Besar/Pelaporan Keuangan (*General Ledger/Financial Reporting System—GL/FRS*)

Sistem buku besar dan sistem pelaporan keuangan sebenarnya adalah dua subsistem yang berbeda. Tetapi, karena kedua subsistem ini berhubungan erat, mereka cenderung dibahas sebagai satu kesatuan. Adapun GLS berfungsi untuk memperbarui buku besar berdasarkan setiap transaksi yang terjadi—baik transaksi umum yang diproses oleh TPS maupun transaksi lain dengan frekuensi kejadian yang lebih jarang. Hasil pembaharuan yang dikerjakan oleh GLS ini kemudian akan diukur oleh FRS. Setelah mengukur perubahan yang terjadi pada kondisi keuangan entitas yang bersangkutan, lebih lanjut FRS akan mengkomunikasikan informasi berupa hasil pengukuran tersebut kepada pengguna eksternal. Informasi yang dimaksud sebagian besar terdiri dari laporan keuangan dan dokumen legal lainnya.

3) Sistem Pelaporan Manajemen (*Management Reporting System—MRS*)

Berbeda dengan GL/FRS memiliki tujuan akhir untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pengguna eksternal, MRS berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan untuk pengguna internal. Ada pun informasi keuangan yang disampaikan oleh kedua sistem juga memiliki sifat yang berbeda. Informasi keuangan yang diedarkan oleh MRS adalah informasi yang dibutuhkan dalam merencanakan dan mengelola operasional entitas. Informasi yang dimaksud biasanya berupa anggaran, laporan varians, analisis *cost-volume-profit*, dan laporan

lainnya yang menggunakan data biaya terkini—bukan *historical cost* sebagaimana yang digunakan oleh laporan keuangan pada umumnya.

2.2 Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

2.2.1 Pengertian dan Penggolongan BMD

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, barang milik daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dari pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa BMD terdiri dari beberapa kelompok barang. Kesimpulan ini didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah yang memperlihatkan bahwa BMD dapat berupa aset lancar, aset tetap, juga aset lainnya. Ada pun penggolongan yang lebih mendetail adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Penggolongan BMD

Kelompok		
Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya
1. Persediaan	1. Tanah 2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Jaringan dan Irigasi 5. Aset Tetap Lainnya 6. Konstruksi dalam Pengerjaan 7. Akumulasi Penyusutan	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 2. Aset Tidak Berwujud 3. Aset Lain-Lain 4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Sumber: Diolah Penulis dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah

Sebagai barang yang diperoleh dari uang negara, maka tentu BMD perlu dipertanggungjawabkan dan dikelola sebaik mungkin untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

2.2.2 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) BMD

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan perangkat lunak yang dikembangkan dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam membuat laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan mulai dari penyusunan anggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban APBD (Utami & Sari, 2017). SIMDA sendiri telah diperkenalkan dan dikembangkan sejak tahun 2006 oleh BPKP selaku badan yang bertugas untuk mengawasi keuangan daerah dan pembangunan nasional. Bukan tanpa alasan, gagasan pembentukan aplikasi SIMDA ini muncul setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan tentang siklus keuangan daerah secara detail—termasuk pula mencantumkan contoh formulir, baik manual maupun terkomputerisasi, yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan mempertimbangkan adanya perubahan zaman, meningkatnya total volume transaksi, dan juga teknologi informasi yang semakin

canggih, dewasa ini Pemerintah terus berusaha untuk mengembangkan aplikasi SIMDA agar dapat memudahkan serta mengefisienkan proses pengelolaan keuangan daerah baik dari segi biaya maupun waktu.

Siklus keuangan daerah memiliki cakupan yang cukup luas. Hal ini membuat SIMDA terbagi menjadi beberapa aplikasi terpisah yang fokus untuk memfasilitasi suatu fungsi tertentu. Adapun aplikasi SIMDA yang eksis hingga saat ini ialah SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Gaji, SIMDA Pendapatan, SIMDA Perencanaan, SIMDA *Dashboard*, dan SIMDA CMS (*Cash Management System*). Selain mempersingkat waktu pemrosesan, komputerisasi siklus keuangan daerah melalui SIMDA juga memungkinkan penggunanya untuk berbagi data karena SIMDA merupakan aplikasi yang terintegrasi. Selain itu, SIMDA juga terus diperbarui dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meminimalisir kemungkinan adanya ketidaksielarasan praktik terkait siklus keuangan daerah antarunit pemerintahan maupun dengan peraturan itu sendiri.

Implementasi SIMDA tentu akan sangat membantu dalam meringankan tugas pengelolaan keuangan daerah, terkhusus bagi Daerah yang terkadang masih menemui kesulitan dalam memahami ataupun menjalankan beberapa kebijakan dan peraturan terkait teknis dari siklus keuangan daerah. Hal ini berlaku terutama untuk SIMDA BMD mengingat aset tetap yang menjadi salah satu komponen BMD kerap kali tampil sebagai isu dalam pengelolaan keuangan daerah. Terbukti, menurut data BPKP per tanggal 30 Juni 2020, jumlah Pemda yang menggunakan SIMDA BMD adalah 403 Pemda. Jumlah ini cukup jauh melampaui penggunaan aplikasi SIMDA lainnya.

SIMDA BMD berfungsi mengumpulkan dan mengolah data BMD serta mengeluarkannya dalam bentuk laporan (Mahayuddin & Fatimah, 2016). Lebih lanjut, Ramanda *et al.* (2021) menuturkan bahwa prosedur pengelolaan BMD yang dapat melibatkan SIMDA BMD meliputi proses perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi. Karena lingkup penggunaan aplikasi ini cukup luas, *output* yang dihasilkan dari aplikasi ini pun juga beragam. Berikut adalah beberapa *output* yang dapat dihasilkan oleh dan/atau diakses melalui aplikasi SIMDA BMD:

Tabel II.2 Output Aplikasi SIMDA BMD

Kategori	Output
Perencanaan	Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah, Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah
Pengadaan	Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan Barang, Daftar Kontrak Pengadaan
Penatausahaan	Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Daftar Mutasi Barang Daerah, Rekap Hasil Sensus
Penghapusan	Surat Keputusan Penghapusan, Lampiran Surat Keputusan Penghapusan, Daftar Barang yang Dihapuskan
Akuntansi	Daftar Barang yang Masuk Neraca (<i>Intracomptable</i>), Daftar Barang <i>Extracomptable</i> , Daftar Penyusutan Aset Tetap, Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), Rekapitulasi Barang per SKPD

Sumber: Diolah Penulis dari bpkp.go.id (2022)

2.3 Sistem Informasi Akuntansi Aset Tetap

2.3.1 Pengertian dan Klasifikasi Aset Tetap

Dalam bukunya, Weygandt *et al.* (2015) mendefinisikan aset tetap secara umum sebagai sumber daya yang memiliki substansi fisik (bentuk dan ukuran yang pasti), digunakan dalam kegiatan bisnis, serta tidak untuk dijual kepada konsumen.

Sedangkan untuk pengertian aset tetap dalam lingkup kebijakan akuntansi pemerintah, PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap memaknai aset tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Selain berwujud, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa aset tetap hendaknya memenuhi lima kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
- 2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas,
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, dan
- 5) memiliki nilai minimal batas kapitalisasi ke atas

Lebih lanjut mengenai aset tetap, PSAP Nomor 07 juga menyertakan klasifikasi aset tetap sebagai berikut:

- 1) *Tanah*. Akun ini mencakup tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) *Peralatan dan Mesin*. Akun ini mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- 3) *Gedung dan Bangunan*. Akun ini mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) *Jalan, Irigasi, dan Jaringan*. Akun ini mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) *Aset Tetap Lainnya*. Akun ini mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) *Konstruksi dalam Pengerjaan*. Akun ini mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Selain keenam akun tersebut, pelaporan berbasis akrual atas aset tetap juga mengharuskan adanya penyajian yang disertai dengan akun akumulasi penyusutan. Namun demikian, perlu diingat bahwa berdasarkan aset tetap berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, serta aset tetap lainnya dalam bentuk koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan, atau tanaman tidak mengalami penyusutan.

2.3.2 Transaksi Terkait Aset Tetap

2.3.2.1 Karakteristik Transaksi Terkait Aset Tetap

Meskipun seintas memiliki banyak kemiripan, sistem aset tetap memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari siklus pengeluaran secara umum.

Adapun karakteristik yang dimaksud merujuk lebih spesifik kepada karakteristik dari transaksi terkait aset tetap. Karakteristik transaksi aset tetap sebagaimana diutarakan oleh Mulyadi (2016) adalah sebagai berikut:

- 1) Frekuensi transaksi terkait aset tetap cenderung lebih sedikit dibanding dengan transaksi siklus pengeluaran lainnya, namun nominal transaksi tersebut umumnya berjumlah besar (material).
- 2) Mekanisme pengendalian aset tetap dalam bentuk otorisasi perolehan aset tetap dilakukan saat perencanaan perolehan serta pelaksanaan perencanaan perolehan aset tetap.

Pengeluaran terkait aset tetap dapat berupa pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) yang langsung dibebankan pada periode berjalan, atau pengeluaran modal (*capital expenditure*) yang akan dikapitalisasikan pada akun aset bersangkutan dan dialokasikan sebagai beban pada periode yang menikmati manfaat dari pengeluaran modal tersebut.

2.3.2.2 Transaksi yang Mengubah Aset Tetap

Menurut Mulyadi (2016), transaksi terkait aset tetap dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu 1) transaksi yang mengubah akun aset tetap, 2) transaksi yang mengubah akun akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan, dan 3) transaksi yang mengubah akun beban reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Perubahan yang dimaksud dapat memberikan pengaruh yang beragam; terdapat pengaruh yang bersifat menambah saldo bersih aset tetap juga pengaruh yang bersifat mengurangi saldo bersih aset tetap. Berikut adalah efek yang ditimbulkan

oleh beberapa jenis transaksi kepada akun-akun terkait aset tetap sebagaimana telah digambarkan Mulyadi (2016):

Tabel II.3 Transaksi yang Mengubah Akun Aset Tetap

Aset Tetap	
Perolehan	Penghentian pemakaian
Pembelian	Penjualan
Pembangunan	Pertukaran
Sumbangan	
Pengeluaran modal	
Revaluasi	
Pertukaran	

Sumber: Mulyadi (2016)

Tabel II.4 Transaksi yang Mengubah Akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
Penghentian pemakaian	Penyusutan
Penjualan	
Pertukaran	

Sumber: Mulyadi (2016)

Untuk akun beban reparasi dan pemeliharaan aset tetap yang juga disebutkan oleh Mulyadi (2016) dalam bukunya, semua transaksi yang mengakibatkan pengeluaran terkait reparasi dan pemeliharaan aset tetap umumnya akan menambah nilai beban yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan.

2.3.3 Tujuan Sistem Aset Tetap

Sama seperti sistem lainnya, sistem aset tetap tentu memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Mengenai perihal tersebut, Hall (2011) mengemukakan bahwa sistem aset tetap secara spesifik memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Memproses perolehan aset tetap sesuai dengan persetujuan dari manajemen dan dengan prosedur yang berlaku
- 2) Menyimpan pencatatan akuntansi terkait perolehan aset, biaya, deskripsi, serta lokasi fisik aset tersebut di dalam organisasi
- 3) Melakukan pencatatan terkait penyusutan aset dengan akurat serta sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku
- 4) Memberikan informasi yang dapat membantu manajemen dalam merencanakan investasi untuk aset tetap
- 5) Merekam penghentian penggunaan dan pelepasan aset tetap sebagaimana mestinya

2.4 Sistem Pengendalian Internal (SPI)

2.4.1 Pengertian dan Konsep Dasar SPI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang dimaksud dengan sistem pengendalian intern adalah

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Pengertian tersebut dapat dicacah menjadi beberapa poin penting sebagai berikut:

- 1) SPI merupakan serangkaian proses yang *tak terpisahkan* satu sama lain.
- 2) SPI merupakan suatu proses yang *dilakukan secara kontinu*, bukan sekadar dilakukan di satu waktu saja.

- 3) SPI adalah proses yang *melibatkan seluruh anggota organisasi*, baik pemimpin maupun pegawai.
- 4) SPI bertujuan untuk *memberikan keyakinan* bahwa suatu kegiatan dilakukan untuk memenuhi tujuan organisasi dan telah dilakukan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Menjadikan penjelasan tersebut sebagai basis, SPI yang efektif tentu akan sangat membantu dalam menunjang dan mempertahankan operasional organisasi. Hal ini dikarenakan dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif, maka tentu risiko keterjadian situasi yang tidak diinginkan—yang dapat mengakibatkan kerugian (finansial) bagi organisasi—dapat diminimalisir. Dalam arti lain, jika suatu organisasi memiliki sistem pengendalian internal yang lemah, maka organisasi tersebut pada dasarnya menghadapi risiko yang cukup besar. Risiko yang dimaksud di antaranya dapat meliputi pencurian/penyalahgunaan aset, praktik KKN, dan lainnya.

Dalam lingkup pemerintahan, ada istilah sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang pada dasarnya adalah SPI yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan. Layaknya sistem pada umumnya, SPIP tersusun atas beberapa unsur yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Untuk memastikan SPIP berjalan dengan baik dan bekerja secara efektif, tentu diperlukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan SPIP secara berkesinambungan. Adapun yang memegang tugas pengawasan ini adalah aparat pengawasan intern

pemerintah (APIP) yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

2.4.2 Tujuan SPI

Jika merujuk kepada Hall (2011), sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk menjaga aset yang dimiliki organisasi.
- 2) Untuk memastikan akurasi dan keandalan dari catatan akuntansi dan informasi.
- 3) Untuk mengampanyekan efisiensi dalam operasional organisasi.
- 4) Untuk mengukur kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan manajemen.

2.4.3 Model Pengendalian Internal

Hall (2011) dalam bukunya memperkenalkan sebuah model pengendalian internal yang disebut *preventive-detective-corrective* (PDC). Model ini mengusung gagasan penerapan pengendalian internal dengan tiga tingkat—pengendalian preventif menjadi tameng pertama, pengendalian detektif di lapisan kedua, dan pengendalian korektif menjadi tembok pertahanan terakhir. Model PDC ini pada dasarnya sama dengan peranan penting SPI yang dikemukakan oleh Romney dan Steinbart (2016) dalam bukunya. Berikut diuraikan penjelasan untuk masing-masing tingkat pengendalian:

- 1) Pengendalian preventif. Sebagai baris pertahanan pertama, suatu organisasi hendaknya menginvestasikan usaha yang memadai dalam membangun pengendalian preventif agar bibit-bibit permasalahan dapat dimusnahkan

sebelum permasalahan itu sendiri termanifestasi. Hal ini dikarenakan pengendalian dengan cara pencegahan dinilai jauh lebih *cost-effective* dibandingkan dengan metode pengendalian lainnya.

- 2) Pengendalian detektif. Meskipun organisasi telah menerapkan pengendalian preventif, hal ini tidak menutup kemungkinan akan adanya permasalahan yang berhasil menyusup melewatinya. Di sinilah peran pengendalian detektif di lapis kedua muncul—pengendalian detektif berfungsi untuk menemukan permasalahan yang berhasil menyelip ke lapis kedua dan memberitahukannya kepada pengguna sistem. Umumnya, pengendalian detektif bekerja ketika ditemukan suatu problem yang dinilai berbeda dari standar yang telah ditetapkan.
- 3) Pengendalian korektif. Ketika pengendalian detektif telah menemukan problem yang menyimpang dari norma, maka tentu masalah tersebut harus segera diperbaiki. Pengendalian korektif berfungsi untuk mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi, memperbaikinya, dan mengembalikan kondisi sistem seperti semula.

2.4.4 Kerangka Pengendalian Internal

Secara teoritis, model pengendalian PDC mampu memberikan gambaran yang praktis serta memberikan pemahaman sederhana mengenai SPI. Namun demikian, pada praktiknya model PDC ini masih terlalu umum untuk dijadikan sebagai panduan dalam merancang suatu SPI. Untuk itu, diperlukan suatu *guideline* yang lebih terperinci untuk membantu suatu organisasi dalam mendesain SPI-nya. Dalam bukunya, Romney dan Steinbart (2016) menuturkan tiga macam *guideline*

SPI yang lebih dikenal dengan sebutan kerangka pengendalian internal. Berikut akan disajikan uraian terkait tiga kerangka pengendalian internal tersebut.

2.4.4.1 Framework COBIT

Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) adalah kerangka pengendalian internal yang dikembangkan oleh ISACA (Information Systems Audit and Control Association) berdasarkan berbagai standar pengendalian yang ada. *Framework* ini merumuskan lima prinsip yang dinilai vital dalam mewujudkan tata kelola juga manajemen yang efektif atas teknologi dan informasi. Berikut adalah lima prinsip yang dimaksud:

- 1) Memenuhi kebutuhan *stakeholder*
- 2) Meliputi keseluruhan fungsi dan operasi *enterprise*
- 3) Mengaplikasikan satu kerangka kerja (*framework*) yang terintegrasi
- 4) Mengimplementasikan pendekatan yang menyeluruh
- 5) Memisahkan tata kelola dengan manajemen

Lebih lanjut, ISACA merumuskan model yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam merancang proses pengendalian yang sesuai dengan COBIT 5. Model ini merincikan aspek tata kelola menjadi lima proses yang dapat disederhanakan menjadi EDM (*evaluate, direct, and monitor*). Sedangkan untuk aspek manajemen, model ini mengidentifikasi 32 proses yang dapat dikelompokkan ke dalam empat domain berikut:

- 1) *Align, plan, and organize* (APO)
- 2) *Build, acquire, and implement* (BAI)
- 3) *Deliver, service, and support* (DSS)

4) *Monitor, evaluate, and assess* (MEA)

2.4.4.2 Framework Pengendalian Internal COSO

Internal Control—Integrated Framework adalah nama dari kerangka pengendalian internal yang disusun oleh *Committee of Sponsoring Organization* (COSO). *Framework* ini telah diterima dan digunakan secara luas dalam mengevaluasi suatu SPI. Berikut adalah uraian terkait lima komponen *framework* pengendalian internal COSO:

- 1) Lingkungan pengendalian. Lingkungan dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir dan bertindak. Hal ini menjadikan lingkungan menjadi salah satu penentu akan keberhasilan serta tingkat efektivitas diterapkannya suatu sistem karena suatu sistem tentu memiliki peranan manusia di dalamnya. Karena pelaksanaan pengendalian internal melibatkan seluruh anggota organisasi, maka tentu dibutuhkan suatu lingkungan yang kondusif agar semua anggota organisasi dapat memiliki pemikiran yang sama serta komitmen yang kuat dalam mewujudkan tujuan organisasi.
- 2) Penilaian risiko. Zaman terus berkembang, begitu pula dengan risiko yang berpotensi mengancam organisasi. Karena itu, organisasi harus selalu siap untuk mengawasi dan mengikuti perubahan yang ada, serta mempertimbangkan perubahan tersebut dalam mengidentifikasi juga menganalisis risiko yang dapat menghalangi tercapainya tujuan organisasi.
- 3) Kegiatan pengendalian. Ketika lingkungan yang mendukung serta kapabilitas untuk menilai risiko telah dimiliki, maka tentu diperlukan pula berbagai kegiatan pengendalian untuk menjalankan SPI itu sendiri. Kegiatan pengendalian

hendaknya diterapkan di berbagai tingkatan organisasi dan dapat menjalankan fungsinya untuk meminimalisir dampak atau bahkan mencegah terjadinya risiko yang dapat mengancam organisasi secara efektif.

- 4) Informasi dan komunikasi. Berbagai informasi, baik internal maupun eksternal, diperlukan untuk memastikan suatu sistem dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, karena SPI melibatkan berbagai informasi serta dijalankan oleh setiap anggota organisasi, maka tentu diperlukan juga adanya komunikasi antara satu dengan yang lain agar setiap orang mengetahui informasi yang dibutuhkan serta memahami tugas yang ia emban dan harus ia pertanggungjawabkan dalam pelaksanaan sistem tersebut.
- 5) Pemantauan. Karena respons terkait risiko dapat bersifat *case-by-case* dan SPI itu sendiri memang dilaksanakan secara terus-menerus serta mengharuskan adanya kepekaan terhadap perubahan, maka perlu diadakan suatu pengawasan berkelanjutan. Pengawasan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk manajemen dalam merespons suatu risiko serta mengevaluasi kinerja SPI dan memperbaiki *loophole* yang ditemui dalam SPI tersebut.

2.4.4.3 Framework ERM COSO

Selain merumuskan *framework* pengendalian internal, COSO juga mengembangkan suatu *framework* yang disebut *Enterprise Risk Management—Integrated Framework* (ERM). ERM disusun untuk dapat membantu meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko. Jika dilihat dari model masing-masing, dapat dilihat bahwa ERM mengadopsi lima komponen pembentuk *framework* IC COSO serta menambahkan tiga komponen baru berupa penetapan tujuan,

identifikasi kejadian (yang dapat memengaruhi entitas), dan respon terhadap risiko.

Adapun prinsip dasar yang diusung ERM adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan dibentuk untuk menghasilkan nilai bagi pemiliknya.
- 2) Manajemen harus menentukan tingkat ketidakpastian yang dapat diterima dalam proses untuk menghasilkan nilai.
- 3) Ketidakpastian dapat menimbulkan risiko ataupun peluang yang bisa memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan maupun mempertahankan nilai secara negatif maupun positif.
- 4) *Framework* ERM dapat membantu mengelola ketidakpastian serta menghasilkan juga mempertahankan nilai.